

## **BAB IV KESIMPULAN**

Penulisan ini menjelaskan tindakan KONTRAS dalam melakukan pengembangan jaringan hak asasi manusia yang dianalisa menggunakan tipologi taktik dari *Transnational Advocacy Network*, bahwa dengan adanya kerangka strategi dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. KONTRAS pada dasarnya pertama didirikan karena dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM, serta banyaknya pengaduan kasus pelanggaran HAM, hal ini terlihat dari kondisi penegakan HAM di Indonesia yang masih lemah, dimana masih banyaknya tindakan pelanggaran HAM pada saat itu. Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi seperti tidak adanya kebebasan berpendapat, diskriminasi, penyiksaan/penganiayaan, penculikan dan penghilangan secara paksa, serta kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Sejak KONTRAS terbentuk, KONTRAS pada kenyataannya sampai saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan pelanggaran HAM berat di Indonesia. Menurut KONTRAS, hal ini masih terjadi karena ketidaksiapan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia. KONTRAS menilai sampai saat ini pemerintah masih saja berfokus pada menstabilkan perekonomian Indonesia dilihat dari berbagai macam bentuk diplomasi Indonesia dengan aktor-aktor lain. Hal ini yang kemudian memunculkan kekecewaan KONTRAS terhadap kinerja serta hukum yang ada di Indonesia.

Atas dasar kekecewaan tersebut kemudian mendorong KONTRAS untuk menjadi NGO yang lebih aktif lagi dalam melakukan perlindungan, penegakkan serta promosi hak asasi manusia di masyarakat. Untuk mewujudkannya, KONTRAS melakukan berbagai upaya dalam menjalankan perannya sebagai badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa pemberian pendidikan akan hak asasi manusia yang dilakukan melalui pendirian Sekolah HAM oleh KONTRAS yang direalisasikan dengan didirikannya SEHAMA (sekolah hak asasi manusia). Selain itu, KONTRAS juga aktif melakukan diskusi publik, seminar, *workshop* baik dengan masyarakat umum, aktivis HAM, mahasiswa, serta pejabat Negara, dalam membahas terkait isu-isu hak asasi manusia yang sedang berkembang dalam proses mencari solusi penyelesaian masalah. Tidak sampai disitu, KONTRAS juga merupakan NGO yang aktif dalam melakukan advokasi HAM terhadap korban tindak pelanggaran HAM yang memerlukan perlindungan secara khusus oleh KONTRAS atas peradilan yang tidak adil di Indonesia.

Selain itu, kekecewaan KONTRAS terhadap pemberian perlindungan serta penegakkan HAM juga terlihat pada ASEAN, dimana KONTRAS menilai lembaga hak asasi manusia yaitu *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR) atau Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh ASEAN masih belum maksimal dalam menjalankan peranannya, dilihat dari masih berlangsungnya beberapa pelanggaran HAM berat di ASEAN itu sendiri. AICHR dibentuk oleh para pendiri ASEAN dengan fungsi untuk memberikan perlindungan HAM dan mempromosikan HAM di ASEAN. Namun pada praktiknya, AICHR dalam menjalankan perannya masih mengalami kendala dan tidak optimal. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh prinsip *ASEAN Way* atau prinsip non-intervensi yang dianut oleh Negara anggota ASEAN yang memberi batasan terhadap segala bentuk intervensi Negara lain dalam menangani suatu kasus yang berhubungan dengan Negara yang terlibat sehingga Negara-negara ASEAN tidak dapat berbuat banyak ketika dihadapkan dalam persoalan kasus HAM serius yang menimpa suatu komunitas dalam sebuah Negara. Ketidakefektifan AICHR kemudian mendorong KONTRAS untuk melakukan pengembangan jaringan di kawasan ASEAN.

Melalui pengembangan jaringan dinilai dapat membantu KONTRAS dalam mengupayakan pemaksimalan penegakan serta pemberian perlindungan HAM di ASEAN. Adapun upaya KONTRAS dalam memaksimalkan perannya dalam ranah Internasional yakni dengan cara mengembangkan jaringannya melalui menjalin kerjasama dengan aktor lain.

Dalam upaya melakukan pengembangan jaringan ini, diperlukannya sebuah strategi yang bisa dilakukan oleh sebuah NGO untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya yaitu dengan cara strategi informasi politik, dilakukan melalui pengumpulan informasi melalui observasi pada kasus yang ingin diteliti sebagai dasar untuk mengetahui lebih dalam terhadap kondisi yang sebenar-benarnya terjadi dalam sebuah permasalahan HAM yang sedang terjadi, kemudian menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar untuk mengambil sebuah kebijakan. Hal ini terjadi seperti pada kasus Rohingya. Dalam kasus ini, KONTRAS melalui kerjasama dengan ASIAN Forum membentuk tim pencari pakta ke Bangladesh untuk melakukan observasi langsung dan mengumpulkan fakta-fakta terkait permasalahan tersebut. Selanjutnya, dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh Tim Pencari Pakta ini kemudian dipublikasikan oleh KONTRAS bersama ASIA Forum melalui siaran pers maupun diskusi umum dengan berbagai NGO sehingga masyarakat internasional serta organisasi internasional mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi dan bersedia ikut mendukung serta membantu segala proses penyelesaian permasalahan tersebut.

Selanjutnya, melalui strategi akuntabilitas politik, dimana dalam upaya mendorong penyelesaian masalah yang lebih baik, KONTRAS mendorong pemerintahan Indonesia untuk aktif melakukan advokasi dengan Negara-negara anggota ASEAN serta Negara yang terlibat kasus pelanggaran HAM. Dorongan KONTRAS terhadap keterlibatan pemerintah Indonesia terlihat dari Surat Terbuka yang dibuat oleh KONTRAS yang ditujukan langsung kepada Menteri Luar

Negeri RI Retno Marsuadi pada Rabu, 6 September 2017. Disamping itu, KONTRAS juga mengeluarkan *Joint Statement on The Rohingya Crisis from The SAPA Working Group* yang merupakan hasil kerjasama KONTRAS dengan organisasi anggota *Solidarity for ASIAN People Advocacies Working Group on ASEAN*.

Tidak sampai disitu, upaya KONTRAS dalam melakukan pengembangan jaringan juga dilakukan melalui symbol politik, upaya untuk menarik perhatian serta memberi penjelasan meyakinkan demi keberhasilan dalam menghimpun dukungan masyarakat yang ditempuh dengan cara menggunakan simbol-simbol, aksi-aksi dan cerita atas situasi tertentu. Adapun upaya yang dilakukan KONTRAS antara lain dengan keikutsertaan KONTRAS dalam aksi solidaritas internasional terhadap kasus hilangnya aktivis HAM Sombath Somphone dari Laos ke Kedutaan Besar Negara Laos dan mengajak publik untuk melakukan pengiriman teks via fax, email ke Kedutaan Besar Laos melalui media sosial twitter dan facebook. Tidak berhenti sampai disitu, KONTRAS bersama AFAD (*Asian Federation Against Involuntary Disappearance*) ikut membantu dalam mengadvokasi permasalahan tersebut ke pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia bersedia untuk terlibat membantu penyelesaian permasalahan tersebut. Selain itu, KONTRAS juga aktif terlibat melakukan aksi turun kejalan dan aksi solidaritas di Kedutaan Besar Myanmar dalam menyampaikan pendapat mereka mengenai krisis Rohingya yang masih berlangsung.

Selain itu, untuk mendukung pemaksimalan pengembangan jaringan, KONTRAS juga mulai membuka kerjasama strategis dengan berbagai organisasi regional Negara kawasan Asia Tenggara seperti ALTSEAN Burma (Myanmar), PAHRA (Filiphina), serta Malaysia dengan Suaram. Berbagai upaya dan kerjasama yang dilakukan oleh KONTRAS memberikan harapan yang besar kepada KONTRAS dalam

proses advokasinya dalam menanggapi berbagai isu-isu HAM yang berkembang di kawasan Asia Tenggara.

